



KABUPATEN BOGOR

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023**

Dinas
**Kebudayaan
& Pariwisata**
Kabupaten Bogor

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
BAB I Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	5
1.1.1. Pengertian Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023	6
1.1.2. Tahapan Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023	8
1.1.3. Keterkaitan Renja dengan RKPD dan Renstra-PD	8
1.2. Landasan Hukum	14
1.3. Maksud dan Tujuan.....	19
1.4. Sistematika Penulisan	19
BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023.....	20
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja (Perangkat Daerah) Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20
2.1.1. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:	47
2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:.....	48
2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:	48
2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan:	49
2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:	50
2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:	51
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	54
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .	59
2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah	60

2.3.2. Uraian tentang permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.....	61
2.3.3. Dampak pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDG's (Sustainable Development Goals)	61
2.3.4. Uraian tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah	63
2.3.5. Uraian tentang formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.....	63
2.3.6. Perubahan – Perubahan yang Terjadi Akibat Pandemi COVID – 19 Hingga Akhir Tahun 2021	64
BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	66
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	66
3.1.1. Uraian terkait arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.....	66
3.1.2. Uraian terkait arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah .	69
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	70
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	71
BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	77
BAB V Penutup	91

RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun secara tahunan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Dokumen Renja Perangkat Daerah disusun mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 memiliki kekhususan tersendiri jika dibandingkan dengan Renja tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota sebagai Pemutakhiran dari pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan .

Setidaknya terdapat beberapa perubahan prinsip dalam pemberlakuan PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tersebut yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan daerah maupun perencanaan perangkat daerah, yaitu :

1. Penentuan Program berdasarkan sub urusan kewenangan yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini berlaku bagi urusan wajib dan pilihan, serta bidang urusan. Adapun unsur, baik penunjang, pendukung, kewilayahan, maupun kesatuan

bangsa dan politik, program ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang unsur tersebut. Dengan adanya penentuan program ini, mengharuskan pelaksanaan program menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah, yang secara langsung merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja utama daerah yang menjadi bagian dari target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Penentuan Kegiatan berdasarkan ketentuan kewenangan daerah berdasarkan apa yang telah tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam hal ini, seluruh kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori urusan wajib dan pilihan, seluruhnya merupakan penjabaran dari UU No. 23 tahun 2014 tersebut. Adapun kegiatan dari perangkat daerah yang merupakan unsur, baik penunjang, pendukung, kewilayahan, maupun kesatuan bangsa dan politik, maka kegiatan ditetapkan berdasarkan tugas pokok yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur tersebut. Dengan adanya penentuan kegiatan tersebut, maka secara berjenjang, kegiatan merupakan tanggung jawab pejabat pada level di bawah kepala perangkat daerah (Eselon 2), dimana kegiatan mendukung secara langsung pencapaian program kepala perangkat daerah.

3. Penentuan sub kegiatan yang mendukung kegiatan, ditetapkan berdasarkan upaya pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), target pencapaian SDG's, dan target-target lainnya yang ditentukan langsung oleh pemerintah pusat berdasarkan target kinerja kementerian vertikal yang menjadi kewenangan konkuren di daerah

Dengan adanya penentuan sub kegiatan, maka secara berjenjang, sub kegiatan dilaksanakan oleh pejabat yang levelnya berada di bawah eselon 3 (eselon 4), dimana sub kegiatan mendukung tercapainya output kegiatan.

Kondisi perubahan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut harus diterapkan dalam perencanaan tahun 2019. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023, mulai tahun 2021 berubah, dan wajib mengakomodir seluruh ketentuan tersebut. Namun demikian, Kementerian Dalam Negeri telah mengarahkan bahwa dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, perlu mengintegrasikan program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam RPJMD dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana yang telah tercantum dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 tersebut dalam bentuk pemetaan program dan kegiatan, beserta target-target pencapaian pada masing-masing level di Perangkat Daerah.

Dengan demikian, dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, seluruh proses pemetaan tersebut harus tercantum secara jelas dalam bab-bab yang ada. Di sisi lain, riwayat pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perubahan RPJMD dan Renstra Tahun 2018-2023.

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018-2023 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023.

Dalam penyusunannya, Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan representasi dari pelaksanaan pendekatan perencanaan

partisipatif, teknokratik, politis, bottom-up dan top-down yang disinergikan dengan target kinerja/prioritas pembangunan pusat dan Provinsi Jawa Barat. Disamping itu, Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 sekaligus merupakan rencana kerja tahun terakhir pada periode perencanaan jangka menengah tahun 2018-2023. Dengan demikian, kinerja yang ditargetkan hingga akhir periode, diarahkan untuk merealisasikan target tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mendukung target kinerja daerah, serta terakumulasi dalam pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Selanjutnya, Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2023 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam pencapaian Visi Misi Bupati Bogor, Tentunya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata memiliki beberapa program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam pencapaian Visi Misi tersebut juga mendukung Misi “Pancakarsa”

1.1.1. Pengertian Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, BUMD maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur. Terkait dengan Rencana Kerja (Renja), bila dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi dimaksud digunakan untuk:

- a. Membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
- c. Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
- d. Menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
- e. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
- f. Mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah; dan
- g. Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Maka dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah, yakni pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 terkait Rencana Kerja (Renja) mengacu pada pasal 3 yang berisi, (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD. (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Dalam hal ini Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 merupakan hasil dari pendekatan perencanaan teknokratis yang dipadukan dengan pendekatan politis (jalur Pokir), partisipatif (jalur Musrenbang Kecamatan), Top-down, dan Bottom-up dalam kerangka perencanaan jangka menengah lingkup dinas kebudayaan dan pariwisata.

1.1.2. Tahapan Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Pasal 125-143 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yaitu :

1. Persiapan penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja;
3. Penyusunan Rancangan Renja;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
5. Penyusunan Rancangan Akhir Renja; dan
6. Penetapan Renja

1.1.3. Keterkaitan Renja dengan RKPD dan Renstra-PD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perangkat Daerah memedomani RKPD, terkait dukungan terhadap :

1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Tabel 1. 1 Keterkaitan Renja Terhadap RKPD Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OUTCOME		TARGET	
		TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10,00	%
		Meningkatnya Tingkat hunian akomodasi	Tingkat hunian akomodasi	70,00	%
	Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	25,00	%
		Meningkatnya perjalanan wisatawan Nusantara yang datang ke Kabupaten Bogor	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	25,00	%
	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan	17	Sub Sektor
	Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Melalui Sertifikasi Nasional	Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi	120	Orang
Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang berkeadaban	Pengembangan Kebudayaan	Berkembangnya Upaya pelestarian kebudayaan melalui penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan Seni Budaya yang Diselenggarakan	10	Festival/ Upacara Adat
	Pengembangan Kesenian Tradisional	Berkembangnya upaya pelestarian kesenian tradisional	Kesenian tradisional yang dilestarikan	48	Orang Pelaku Seni

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OUTCOME		TARGET	
		TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan	50,00	Cagar Budaya
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100	%

2. Pencapaian Target Sasaran Daerah (IKU) Untuk Tahun 2021 Program Berdasarkan Renstra :

Tabel 1. 2 Pencapaian target sasaran daerah Tahun 2021

PROGRAM	OUTCOME		TUJUAN DAN SASARAN PD	KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	KINERJA SASARAN DAERAH		
	TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Program Pengembangan Kebudayaan	Berkembangnya Upaya pelestarian kebudayaan melalui penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan Seni Budaya yang Diselenggarakan	Tujuan : Pelestarian Kebudayaan	Kegiatan Seni Budaya yang Diselenggarakan	Festival/ Upacara Adat	10	Tujuan: Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban Sasaran: Pelestarian Kebudayaan	Kegiatan Seni Budaya yang Diselenggarakan	Festival/ Upacara Adat	10
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Berkembangnya upaya pelestarian kesenian tradisional	Kesenian tradisional yang dilestarikan	Sasaran : 1. Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan 2. Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Kesenian tradisional yang dilestarikan	Kesenian	48		Kesenian tradisional yang dilestarikan	Kesenian	48
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan		Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan	Cagar Budaya	50,00		Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan	Cagar Budaya	50,00

PROGRAM	OUTCOME		TUJUAN DAN SASARAN PD	KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	KINERJA SASARAN DAERAH				
	TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah Sasaran: Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	10,00	Tujuan : Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Sasaran: Meningkatnya Daya Saing Daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	10,00		
	Bertambahnya Tingkat hunian akomodasi	Tingkat hunian akomodasi		Tingkat hunian akomodasi	%	70,00		Tingkat hunian akomodasi	%	70,00		
Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor		Sasaran: Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor	%		25,00	Sasaran: Meningkatnya Daya Saing Daerah	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor	%	25,00
	Meningkatnya perjalanan wisatawan Nusantara	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota Bogor			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota Bogor	%		25,00		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota Bogor	%	25,00

PROGRAM	OUTCOME		TUJUAN DAN SASARAN PD	KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	KINERJA SASARAN DAERAH		
	TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan		Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan	Sub Sektor	17		Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan	Sub Sektor	17
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Daya Saing SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif Melalui Sertifikasi Nasional	Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi		Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi	Orang	120		Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi	Orang	120

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Daerah dan Paralel dengan Rencana Strategis K/L yang disusun oleh masing-masing K/L dalam kurun waktu 5 Tahun. Selanjutnya berdasarkan Renstra K/L, masing-masing K/L menyusun Rancangan Rencana Kerja K/L setiap tahunnya yang dijabarkan dalam Renja Tahunan.

Dalam Penyusunan Renja Tahunan tentunya mengacu kepada Renstra Provinsi dimana ada beberapa isu yang terkait yang diangkat oleh Provinsi seperti mengembangkan pariwisata yang edukatif dan kreatif berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan, melestarikan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sehingga akhirnya PD pun menjadikan hal tersebut sebagai arah kebijakan yang selanjutnya menjadi Renstra dan dituangkan dalam Renja Tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang/Perpu tentang Covid-19 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Komenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan infentarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota sebagai Pemutakhiran dari pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96. Tambahan, Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

- Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Pemerintah (PP) No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 459) sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
 36. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja (dituliskan nama PD) Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan RAPBD tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 adalah :

1. Menjadi panduan dalam perumusan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2023.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
3. Menjadi panduan penyusunan rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagaimana ketentuan PMDN 86 Tahun 2017 Pasal 20 adalah sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran umum kondisi Daerah;
- c. Permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. Visi dan Misi Daerah;
- e. Arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- f. Penutup

BAB II

Hasil Evaluasi Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja (Perangkat Daerah) Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mewujudkan visi dan misi dinas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyusun rencana kerja. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menguraikan seluruh program dan kegiatan yang ada dimasing-masing bidang dan bagian sekretariat.

Secara umum kondisi Pada Tahun 2021, Total anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp. 20.573.132.119,- Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 8 program,18 kegiatan dan 54 Sub Kegiatan. Sementara total realisasi anggaran pada tahun 2023 adalah Rp. 20.200.478.381,- dengan persentase realisasi anggaran 98,19%, dengan persentase rata-rata tingkat capaian anggaran Per Sub Kegiatan adalah 100%, per Kegiatan 100% dan per Program 76,16% yang masuk kedalam predikat sangat tinggi untuk sub kegiatan dan kegiatan serta tinggi untuk predikat capaian Program.

Rata-rata tingkat capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah 108,23% yang mendapat predikat kerja sangat rendah, capaian ini terjadi karena adanya tren *revenge tourism*, dimana selama tahun 2020 pembatasan kegiatan masyarakat untuk bepergian terutama berwisata sangat dibatasi, setelah angka kasus pandemi Covid-19 mulai melandai minat masyarakat untuk berwisata menjadi melonjak. Selain itu target Jumlah Objek Kemajuan Budaya yang dilestarikan dan Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan tercapai 100

Diharapkan untuk tahun 2023 wabah Pandemi COVID-19 sudah selesai 100%, dan tidak ada lagi kebijakan pembatasan masyarakat baik itu dalam bentuk PSBB ataupun PPKM, sehingga kegiatan Industri Pariwisata dapat kembali dalam keadaan semula dan jauh lebih baik daripada tahun 2021, dan dapat mendorong tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor yang sebelumnya terbatas karena kondisi Wabah Pandemi COVID-

19, selain itu juga dengan telah selesainya Wabah Pandemi COVID-19 di tahun 2023 dapat mendukung terlaksananya kegiatan pelatihan maupun penyelenggaraan acara lainnya yang menjadi target kinerja dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Sementara dalam dukungan terhadap Pancakarsa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengampu 2 (dua) karsa yaitu **Karsa Bogor Maju** dan **Karsa Bogor Berkeadaban**. Yang dilaksanakan oleh 7 (Tujuh) Kegiatan yaitu:

Karsa Bogor Maju, melalui:

- Penyelenggaraan event pariwisata tingkat nasional dan internasional
- Festival wisata desa
- Pengembangan Geopark

Karsa Bogor Berkeadaban, melalui:

- Menyenggarakan festival seni dan budaya
- Pengembangan dan pelestarian budaya Cimande
- Pelestarian budaya melalui program Bogor Culture Night
- Serta Pelestarian Bahasa Sunda melalui “Kegiatan Kemis Nyunda” yang baru mulai diampu di Tahun 2021

Untuk capaian dukungan terhadap Pancakarsa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendapatkan persentase capaian 47,90%. Angka capaian ini mendapatkan predikat sangat Rendah, karena sebagian besar bentuk kegiatan dukungan terhadap Pancakarsa adalah penyelenggaraan acara, yang tidak dapat terlaksana karena Kebijakan Pembatasan selama Wabah Pandemi Covid-19.

Berikut merupakan tabel capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2018-2023.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
12					Wajib Non Pelayanan Dasar								
12	16				Kebudayaan								
12	16	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		6	15				
			0001		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Rekening	4	4				
			0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	Kendaraan	19	21	17			
			0003		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kantor kebersihan yang dibayar	Jasa	25	12	2			
			0004		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah jasa pendukung adm/teknis perkantoran	Jasa	2	12	3			
			0021		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK, Barang Cetak dan Penggandaan	Barang	49	52	-			
			0022		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Barang	13	12				

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0023		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penenrangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi yang tersedia	Barang	5	5	-			
			0024		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku per UU, Surat kabar dan majalah	Barang	8	3	-			
			0025		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Isi Ulang Tabung Gas	Barang	0	12				
			0026		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	Makan/Minum	1024	2515	455			
			0027		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Kegiatan	629	430	4			
			0041		Penyediaan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	Jumlah Dokumen dan Arsip SKPD	Dokumen	6	4	2			
			0042		Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Dokumen	65	65				
			0043		Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Jumlah dokumen administrasi barang	Dokumen	5	5				

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0044		Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Jumlah jasa keamanan gedung kantor dan gedung kesenian	Jasa	10	12				
12	16	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	Sarana	4	5				
			0042		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan	Kendaraan	0	10				
			0002		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Jumlah Gedung yang Dipelihara	Bangunan	1	1	-			
			0008		Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi	Jumlah Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi yang Dipelihara	Bulan	1	12	-			
			0010		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kendaraan	21	21	16			
			0011		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	Barang	3	4	-			

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	16	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yg berdisiplin	Kegiatan	0	1				
			0001		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapan	Pakaian	0	75				
12	16	05	01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peserta Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	15				
12	16	05	05		Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	Penyelenggaraan Olahraga dan Pengajian	Kegiatan	48	50	22			
12	16	05	28		Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Peserta Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	15				
12	16	04			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yg berkualitas	Kegiatan	29	2				
			0008		Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Orang	16	15	15			
			0010		Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur	Jumlah Pengajian dan Senam	Kegiatan	48	50	22			

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	16	05			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD	Pelaporan	5	8				
			0001		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip	Dokumen	1	1				
			0003		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	1	17				
			0004		Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan anggaran	Dokumen	1	5	4			
			0005		Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Dokumen	736	800	305			
			0006		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi	Dokumen	1	19	8			
			0007		Publikasi Kinerja SKPD	Jumlah Publikasi Media yang Terselenggara	Dokumen	12	8	19			
			0008		Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	2				
			0009		Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah dokumen Renstra	Dokumen	1	1				

				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
							REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	16	06		Program Pengembangan Nilai Budaya	Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	Kegiatan	7	25	2			
			0001	Penyelenggaraan Upacara Adat dan Festival Budaya Kabupaten Bogor	Jumlah Penyelenggaraan Festival	Kegiatan	19	19	2			
			0002	Pemberdayaan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1	1				
			0003	Penyelenggaraan Festival Kaulinan Urang Lembur (alimpaido)	Jumlah Festival	Kegiatan	1	1				
			0004	Penyelenggaraan Festival Pencak Silat Cimande	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3	3				
			0005	Penyelenggaraan Festival Seni Nuansa Islam	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1	1				
			'0006	Penyelenggaraan Pasanggiri Seni Sunda	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1	1				
			0007	Penyelenggaraan Festival Musik Etnis	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1	1				
			0008	Penyelenggaraan Festival Angklung	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		15				

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	16	07			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	BCB	30	40				
						Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	BCB	58	58				
			0002		Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Peserta	Orang	100	230				
			0003		Pemeliharaan Situs dan benda Cagar Budaya	Jumlah Situs dan Cagar Budaya	BCB	65	65				
			0004		Inventarisasi dan Verifikasi Cagar Budaya	Jumlah Penetapan Situs Cagar Budaya	BCB	4	5				
			0009		Lokakarya Konservasi Benda Cagar Budaya	Jumlah Peserta Lokakarya	Orang		80				
12	16	08			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya Budaya	6	44				
			0001		Pengiriman Misi Kebudayaan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	2	2				
			0002		Pembinaan Kesenian di Kabupaten Bogor	Jumlah Karya Seni	Karya Seni	29	23				

				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
							REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0003	Pementasan Kesenian di Tempat Wisata dan Event Tertentu	Jumlah Tampilan Kesenian	Tampilan	47	40	16			
			0004	Pelestarian Budaya Wayang Golek	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3	3				
			0005	Bimbingan Seni dan Budaya Kabupaten Bogor	Jumlah Karya Seni	Karya Seni	4	4				
			0007	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Seni	Jumlah Alat Kesenian	Alat Kesenian		10				
			0008	Revitalisasi Seni Tradisional	Jumlah Karya Seni	Karya Seni		1				
12	16	09		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata Berstandar Nasional	Usaha	15	22	23			
			0001	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Pemerintah Kabupaten Bogor	Jumlah Daya Tarik Wisata	DTW	1	1	1			
			0002	Penyusunan Rencana Pengembangan daya tarik wisata	Jumlah Obyek Wisata	Objek	1	1	1			
			0004	Pengembangan Usaha Sarana Wisata	Jumlah Usaha Sarana Wisata	Usaha		4				

				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
							REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0007	Penerapan standar Usaha daya tarik wisata	Jumlah Usaha Daya Tarik Wisata	DTW	35	75	26			
			0008	Penerapan standar Usaha Sarana wisata	Jumlah Usaha Sarana Wisata	Usaha		90	58			
			0009	Penerapan standar Usaha Jasa wisata	Jumlah Usaha Jasa Wisata	Usaha	60	90	122			
			0010	Pengembangan Paket Wisata	Jumlah Paket	Paket	10	10				
			0011	Pelaksanaan Travel Dialog	Jumlah Usaha Jasa Wisata	Usaha	20	50				
			0015	Sosialisasi Sertifikasi Usaha Daya Tarik Wisata	Jumlah Usaha	Usaha		45				
			0016	Sosialisasi Sertifikasi Usaha Sarana Wisata	Jumlah Usaha	Usaha		90				
			0017	Sosialisasi Sertifikasi Usaha Jasa Wisata	Jumlah Usaha	Usaha		70				
12	16	10		Program Pengembangan Kemitraan	Lama Kunjungan wisata	Hari	1.56	1.56				
			0001	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Peserta	Orang	100	66				

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0002		Pembinaan Ekonomi Kreatif dan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Jumlah Peserta	Orang	2	82	60			
			0004		Pelatihan Kompetensi SDM Pariwisata	Jumlah Peserta	Orang		240				
			0005		Penyelenggaraan Uji Kompetensi /Sertifikasi Pelaku Usaha Pariwisata	Jumlah Peserta Uji Kompetensi / Sertifikat pelaku Usaha Pariwisata (Akomodasi dan RHU)	Orang	140	50				
			0006		Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata dan budaya	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	4	280				
			0007		Penerapan Sadar Wisata Terhadap Masyarakat dan aparat	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	100	160	5			
			0008		Peningkatan Kerjasama Pariwisata dan Budaya	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	4	3				
			0009		FamTrip untuk Jurnalis	Jumlah Peserta	Orang	30	40				

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0011		Workshop Pengembangan SDM pariwisata, ekraf dan budaya	Jumlah Peserta	Orang		75				
			0012		Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Wisata Desa	Jumlah Peserta	Orang		100	30			
12	16	11			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan Wisatawan Domestik (%)	Wisatawan	7,173,278	9,136,817	4,408,734			
						Kunjungan Wisatawan Mancanegara (%)	Wisatawan	339,931	215,429	60,552			
			0001		Pengadaan Bahan dan Barang Promosi Pariwisata dan Budaya	Jumlah Sarana Promosi Pariwisata dan Budaya	Sarana	8	6	6			
			0002		Pameran Dalam Negeri	Jumlah Kegiatan Promosi Pariwisata	Kegiatan	3	2	5			
			0004		Road Show Pariwisata Kabupaten Bogor	Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata	Event	3	2	27			
			0005		Penyebaran Informasi Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bogor	Jumlah Media Penyebaran Informasi Pariwisata	Sarana	2	3				

				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
							REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0006	Festival Makanan dan Minuman (Kuliner) Kabupaten Bogor	Jumlah Peserta	Orang	1	40				
			0007	Penyelenggaraan Festival Burung Berkicau	Jumlah Peserta	Orang	1	1000				
			0008	Penyelenggaraan Pasangiri Mojang dan Jajaka Kabupaten Bogor	Jumlah Peserta Hasil Seleksi (Karantina)	Orang	30	30				
			0009	Penyelenggaraan Bogor Wonderfull Golf	Jumlah Peserta	Orang	1	200				
			0010	Penyelenggaraan Wisata Rally / Offroad	Jumlah Peserta	Orang	1	100				
			0011	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah / Helaran	Jumlah Kegiatan	Orang	1	1				
			0013	Pengelolaan Pusat Informasi Wisatawan	Jumlah Pengelolaan data dan sistem informasi	Buan	1	12				
			0015	Penyusunan Data dan Informasi Pariwisata dan Budaya	Jumlah Dokumen kajian	Dokumen		4	1			
			0016	Penyelenggaraan Bogor Tourism Mart dan Expo (BTME)	Jumlah Pelaksanaan	Kegiatan	1	1				
			0017	Penyelenggaraan Gebyar Tahun Baru	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		1	1			

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kegiatan Seni Budaya yang Diselenggarakan	Festival/ Upacara Adat				10	10	100%
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya	Upacara Adat				10	10	100%
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Festival Budaya dan Upacara Adat	Upacara Adat				10	10	100%
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penampilan kesenian	Penampilan seni				8	8	100%
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya penampilan kesenian	Penampilan seni				8	8	100%
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kesenian tradisional yang dilestarikan	Kesenian				44	44	100%

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Orang				100	100	100%
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	SDM Kesenian yang dilatih	Orang				100	100	100%
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Lembaga Seni yang difasilitasi	Lembaga Seni				9	9	100%
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan	%				47.22	47.22	100%
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Terlestarikan	Cagar Budaya				68	68	100%
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Cagar Budaya				4	4	100%
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Cagar budaya dan situs yang difasilitasi	Cagar Budaya				65	65	100%

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%				100	100	100%
2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dokumen				27	27	100%
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, pelaksanaan Forum PD, termasuk perubahannya	Dokumen				2	2	100%
2	22	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD dan perubahan	Dokumen				2	2	100%
2	22	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA Dinas dan perubahan	Dokumen				2	2	100%
2	22	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen evaluasi LPPD, LKPJ, LAKIP, dll	Dokumen				5	5	100%

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan internal PD (pada masing-masing bidang/bagian) terkait pencapaian IKU-PD, termasuk laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan yang berkaitan dengan kinerja	Dokumen				16	16	100%
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Dokumen				839	839	100%
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan				12	12	100%
2	22	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan				12	12	100%
2	22	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen				17	17	100%

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen				10	10	100%
2	22	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semester	Bulan				12	12	100%
2	22	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis	Dokumen				2	2	100%
2	22	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Aparatur	Layanan				3	3	100%
2	22	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Bulan				12	12	100%
2	22	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Bulan				12	12	100%
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Layanan				18	18	100%

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan				12	12	100%
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan				12	12	100%
2	22	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Bulan				12	12	100%
2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Bulan				12	12	100%
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan				12	12	100%
2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Bulan				12	12	100%
2	22	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Bulan				12	12	100%
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan				12	12	100%
2	22	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Arsip Dinamis Dinas	Bulan				12	12	100%

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Unit				12	12	100%
2	22	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Roda 2/4	Unit				0	0	0%
2	22	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Unit				12	12	100%
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Layanan				18	18	100%
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan				12	12	100%
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Bulan				12	12	100%
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan				18	18	100%

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Bulan				12	12	100%
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Bulan				12	12	100%
2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Bulan				12	12	100%
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	Bulan				12	12	100%
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
3	26	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%				10	8.6	86%
						Tingkat hunian akomodasi	%				50	40.11	80%
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan Daya Tarik Wisata	DTW				100	100	100%

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tersusunnya perencanaan Daya tarik wisata unggulan	DTW				2	2	100%
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan daya tarik wisata kabupaten	DTW				1	1	100%
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten	DTW				100	100	100%
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersusunnya perencanaan kawasan strategis	Kawasan				2	2	100%
3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata	Tersusunnya perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten	Kawasan				2		0%
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten	Usaha				150	0	0%

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten	Usaha				150	150	100%
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Wisata yang dikelola	Desa Wisata				40	40	100%
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Usaha				250	0	0%
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Usaha				150	150	100%
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata	Festival				1	1	100%

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten/kota	%				11.88	-95.93	-807%
						Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%				11.88	41.36	348%
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan pemasaran Pariwisata Kabupaten Bogor	Kegiatan Pemasaran				4	4	100%
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media dalam dan Luar Negeri dan pengadaan sarana promosi	Jenis				3	3	100%

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten	Kegiatan				9	9	100%
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Paket				3	3	100%
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya kerjasama dan kemitraan Pariwisata dalam dan luar negeri	Kerjasama				4	4	100%
													#DIV/0!
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan	Sub Sektor				11	11	100%
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Produk Usaha Ekonomi Kreatif Yang Difasilitasi	Produk Usaha				60	60	100%

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	04	2.02	05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Tersedianya sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Sistem Pemasaran				0	0	0%
3	26	04	2.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Produk Usaha yang Difasilitasi	Produk Usaha				60	60	100%
3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Unit Usaha				0	0	0%
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi	Orang				80	80	100%
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang				80	80	100%
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Orang				165	165	100%

					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
								REALISASI			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	05	2.01	02	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang				0	0	0%
3	26	05	2.01	03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang				275	0	0%
3	26	05	2.01	04	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Terlaksananya Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang				30	0	0%
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dilatih	Orang				100	100	100%
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang				100	100	100%

2.1.1. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan realisasi Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD hanya mencapai 8.60% dari target 10.00% atau 86%;

2. *Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan realisasi Tingkat Hunian Akomodasi hanya mencapai 40.11 dari target 50 atau sekitar 80%;*
3. *Program Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan realisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata hanya mencapai 0 dari target 275 atau sekitar 0%;*
4. *Program Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan realisasi Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) hanya mencapai 0 dari target 30 atau 0%.*

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. **Terpenuhinya Target** Program Pengembangan Kebudayaan 100%
2. **Terpenuhinya Target** Program Pengembangan Kesenian Tradisional 100%;
3. **Terpenuhinya Target** Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 100%;
4. **Terpenuhinya Target** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100%;
5. **Terpenuhinya Target** Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 100%;

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. *Program Pemasaran Pariwisata dengan realisasi target indikator Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara*

yang Datang ke Kabupaten/Kota mencapai 41.36 dari target 11.88 atau sekitar 348% karena adanya tren *revenge tourism*, dimana selama tahun 2020 pembatasan kegiatan masyarakat untuk bepergian terutama berwisata sangat dibatasi, setelah angka kasus pandemi Covid-19 mulai melandai minat masyarakat untuk berwisata menjadi melonjak.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

1. ***Tidak Tercapainya Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata*** realisasi *Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD* hanya mencapai 8.6 dari target 10 atau 86%, dikarenakan pada tahun 2021 hampir tidak memiliki kendala yang berarti dalam pelaksanaan program tersebut;
2. ***Tidak Tercapainya Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata*** dengan realisasi *Tingkat Hunian Akomodasi* hanya mencapai 40.11 dari target 50 atau sekitar 80%, dikarenakan pada tahun 2021 hampir tidak memiliki kendala yang berarti dalam pelaksanaan program tersebut;
3. ***Terpenuhinya Program Pengembangan Kebudayaan*** mencapai target 100%, dikarenakan pada tahun 2021 hampir tidak memiliki kendala yang berarti dalam pelaksanaan program tersebut;
4. ***Terpenuhinya Program Pengembangan Kesenian Tradisional*** mencapai target 100% dikarenakan pada tahun 2021 hampir tidak memiliki kendala yang berarti dalam pelaksanaan program tersebut;
5. ***Terpenuhinya Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya*** mencapai target 100% dikarenakan pada

tahun 2021 hampir tidak memiliki kendala yang berarti dalam pelaksanaan program tersebut;

6. **Terpenuhinya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** mencapai target 100%, dikarenakan pada tahun 2021 hampir tidak memiliki kendala yang berarti dalam pelaksanaan program tersebut;
7. **Terpenuhinya Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif** mencapai target 100%, dikarenakan pada tahun 2021 hampir tidak memiliki kendala yang berarti dalam pelaksanaan program tersebut;

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:

1. **Implikasi dari Tidak Tercapainya Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** dengan target *Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD berimbang* pada tidak tercapainya target Pendapatan Daerah pada tahun 2021, dengan tidak tercapainya target PAD tersebut maka anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) menjadi lebih rendah, sehingga kegiatan-kegiatan strategis Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD menjadi terkendala.
2. **Implikasi dari Tidak Tercapainya Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** dengan target *Tingkat Hunian Akomodasi berimbang* pada capaian Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD. Persentase PAD tertinggi dari sektor pariwisata adalah Pajak Pendapatan Hotel, tingkat hunian akomodasi adalah persentase jumlah kamar terjual dibandingkan dengan jumlah kamar yang tersedia. Dengan rendahnya capaian tingkat hunian akomodasi maka target pajak dari hotel menjadi rendah.
3. **Implikasi dari Terpenuhinya Program Pengembangan Kebudayaan** dengan indikator cakupan Festival/ Upacara

Adat adalah terlestarikannya Kebudayaan daerah Kabupaten Bogor.

- 4. **Implikasi dari Terpenuhinya** Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan indikator kesenian adalah terlestarikannya kesenian-kesenian Daerah Kabupaten Bogor berikut dengan pelaku keseniannya*
- 5. **Implikasi dari Terpenuhinya** Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan indikator cagar budaya adalah terlindunginya benda, situs dan cagar budaya sebagai peninggalan sejarah suatu daerah;*
- 6. **Implikasi dari Terpenuhinya** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah sebagai penunjang program-program pada urusan pemerintah Bidang Pariwisata dan Kebudayaan*
- 7. **Implikasi dari Terpenuhinya** Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan indikator jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi adalah peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor*
- 8. **Implikasi dari Melebihi Target** Program Pemasaran Pariwisata dengan Realisasi target indikator Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota*

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi: analisa RPJMN, renstra Kementrian Pertanian Republik Indonesia, RPJMD Provinsi Jawa Barat, analisa renstra Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat, RPJMD Kabupaten Bogor, analisa

Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dalam tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata
2. Pengembangan Promosi dan fasilitasi pemasaran, pemanfaatan sistem informasi dan menjalin kerjasama dan kemitraan
3. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif
5. Pengelolaan kebudayaan dan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah
6. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah
7. Pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya sebagai kekayaan budaya.

Tabel 2.2
Hasil Pencapaian Dukungan terhadap Pancakarsa Tahun 2020 dan 2021

PANCAKARSA	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	VOLUME (TAHUN 2020)			VOLUME (TAHUN 2021)		
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5) X 100%	8	9	10 = (9/8) X 100%
MAJU									
Penyelenggaraan event pariwisata tingkat nasional dan internasional	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kegiatan	44	22	50,00%	9	9	100,00%
Festival wisata desa	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Festival	30	30	100,00%	1	0	0,00%
Pengembangan Geopark	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik	1	1	100,00%	1	0	0,00%
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cagar Budaya				1	1	100,00%
BERKEADABAN									
Menyelenggarakan festival seni dan budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Budaya	25	3	12,00%	8	8	100,00%
Pengembangan dan pelestarian budaya Cimande	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	0	0,00%	1	0	0,00%
Pelestarian budaya melalui program Bogor Culture Night	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penampilan	59	15	25,42%	10	8	80,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pencapaian Misi Pemerintah Daerah Periode 2018-2023 yaitu **Meningkatkan Kesalehan Sosial**, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Pelestarian Kebudayaan dengan Indikator tujuan adalah Persentase Kebudayaan yang dilestarikan. Dari tujuan perangkat Daerah tersebut dijabarkan dalam 2 sasaran perangkat Daerah yaitu:

1. Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan;
2. Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya

Adapun hasil dari pelaksanaan kerja Dinas untuk Indikator Kinerja Tahun 2021 Tujuan Perangkat Daerah adalah 57,91% dari target 57,91%, dengan rasio capaian 100%. Kemudian capaian untuk indikator sasaran adalah:

1. Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan Indikator Sasaran adalah Objek Pemajuan Budaya yang dilestarikan sebanyak 54 Objek budaya dari target 54 Objek Budaya, dengan rasio capaian 100% ;
2. Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya dengan Indikator Sasaran adalah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 68 Cagar Budaya dari target 68 Cagar Budaya, dengan rasio capaian 100%.

Sedangkan untuk Misi Pemerintah Daerah **Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan**, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah meningkatnya daya saing pariwisata Daerah. Dengan Sasaran yang menunjangnya adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.

Dari target IKU Tujuan Dinas Kebudayaan Pariwisata yaitu meningkatnya Daya saing Pariwisata Daerah dengan indikatornya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB , pada tahun 2021

tercapai sebanyak 2,59% dari target 4,98% dengan rasio capaian 51,92%. Lalu untuk ketercapaian target sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan tercapai sebanyak 6.164.229 kunjungan dari target 5.000.000 kunjungan, dengan rasio capaian 123,28%.

Berdasarkan hasil analisis keterkaitan indikator sasaran yang melebihi target namun indikator tujuannya tidak, adalah daya beli masyarakat dalam sektor pariwisata cenderung menurun akibat Pandemi Covid-19. Minat masyarakat untuk berwisata sangat tinggi, namun kondisi perekonomian yg sempat terpuruk menyebabkan daya beli masyarakat juga menurun. Selain itu **Kunjungan Wisata** Tentunya dipengaruhi oleh banyaknya Obyek Daya Tarik Wisata baru dan Rekreasi Hiburan Umum yang beroperasi di Kabupaten Bogor, sedangkan untuk kunjungan terbanyak masih di dominasi oleh domestik dikarenakan jarak tempuh yang rata-rata pengunjungnya dari wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok, sehingga berpengaruh kepada lamanya tinggal karena pengunjung dari wilayah yang dekat tidak menginap dan menyebabkan lama tinggal belum memenuhi target.

Pada perubahan RPJMD tahun 2021 terdapat penyesuaian mengenai IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan adanya penyesuaian yang berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019. Berikut adalah tabel yang menguraikan Evaluasi Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hingga outcome yang dicapai dari tahun 2018-202

Tabel 2.3
Evaluasi hasil Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Hingga Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
			REALISASI			TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
	TUJUAN							
	Meningkatnya daya saing pariwisata daerah		N/A					
	PDRB Sektor Pariwisata	Triliun (Rp)	5.979.265,40	6.485.267,78	6.081.136,34			
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%				4,98	2,59	52,01%
	SASARAN							
	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan							
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kunjungan	N/A	9.433.420	4.469.286	5.000.000	6.164.229	123,28%
	OUTCOME							
1	Jumlah Usaha Pariwisata Berstandar Nasional	Usaha	N/A	22	23			
2	Lama Kunjungan Wisata	Hari	N/A	1,56	1,56			
3	Kunjungan Wisatawan Domestik	Kunjungan	N/A	9.462.045	4.408.734			
4	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Kunjungan	N/A	325.518	60.552			
5	Jumlah Event Pariwisata	Event	N/A	11	27			
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%				10	8,6	86,00%
7	Tingkat hunian akomodasi	%				50	40,11	80,22%
8	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor	%				11,88	-95,93	-807,49%
9	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Bogor	%				11,88	41,36	348,15%
10	Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan	Sub Sektor				11	11	100,00%
11	Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang	Orang				80	80	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
			REALISASI			TARGET	REALISASI	REALISASI (%) 10 = (9/8)x100%
1	2	3	4	6	7	8	9	
	Tersertifikasi							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
TUJUAN								
	Meningkatnya pelestarian nilai budaya daerah		N/A					
	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	N/A	65,00	65,00			
	Pelestarian Kebudayaan		N/A					
	Persentase Kebudayaan yang dilestarikan	%				57,91	57,91	100%
SASARAN								
	Meningkatnya pelestarian nilai budaya daerah		N/A					
	Persentase Warisan Budaya tak benda yang dilestarikan	%	N/A	39,35	29,38			
	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	N/A	40,00	40,00			
	Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan							
	Objek Pemajuan Budaya yang dilestarikan	Objek Budaya				54	54	100%
	Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya							
	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya				68	68	100%
OUTCOME								
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Festival	N/A	25	2			
2	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya Budaya	N/A	45	45			
3	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	N/A	40,00	40,00			

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2018	2019	2020	2021		
			REALISASI			TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
4	Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	Warisan	N/A	65	65			
5	Kegiatan Seni Budaya Yang Diselenggarakan	Festival / Upacara Adat				10	10	100%
6	Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan	Kesenian				44	44	100%
7	Persentase Situs dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%				47,22	47,22	100%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperhatikan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Hal ini diperlukan dikarenakan isu-isu strategis yang berkembang akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja serta mempengaruhi perencanaan pembangunan pariwisata dan budaya.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap kondisi lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), serta memperhatikan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pencermatan lingkungan internal dan eksternal, faktor-faktor penghambat dan pendorong, kesimpulan analisis dan telaahan isu-isu strategis berdasarkan kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal akan menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun yang akan datang (2018-2023) agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isu strategis yang diperoleh yaitu :

- a. Target Kementerian Pariwisata 80 persen industri pariwisata Indonesia sudah tersertifikasi setiap tahunnya (kompas);
- b. Sektor pariwisata sebagai lokomotif pendongkrak perekonomian daerah;
- c. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor sudah termasuk tertinggi di Indonesia, namun lama tinggal wisatawan rata-rata masih dibawah 2 hari yang berarti tidak menginap;
- d. Belum optimalnya sinergi kemitraan antar stakeholder yang menunjang pada pengelolaan sumber daya pariwisata daerah;
- e. Kajian dan metode pemasaran, promosi, dan penyelenggaraan event yang kurang optimal;
- f. Mengembalikan nilai-nilai budaya daerah sebagai jati diri masyarakat;

- g. Banyaknya BCB (Benda Cagar Budaya) yang belum dilestarikan berpotensi rusak bahkan hilang;
- h. Banyaknya pengaruh budaya luar berpotensi mengikis warisan budaya tak benda yang ada;
- i. Banyaknya kesenian daerah yang hampir punah.

Permasalahan Pelayanan Dinas Budaya dan Pariwisata :

1. Masih rendahnya penerapan standar Usaha Pariwisata bagi para pelaku usaha
2. Perlu adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata serta masih ada beberapa akses jalan yang buruk menuju Daya Tarik Wisata (DTW)
3. Perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dan aparatur di objek wisata melalui gerakan Kelompok Sadar Wisata
4. Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM Pariwisata, ekonomi kreatif dan Kebudayaan
5. Potensi Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Bogor belum terkelola secara optimal
6. Perlu adanya peningkatan warisan budaya baik itu Benda situs cagar budaya (warisan benda) dan Objek pemajuan kebudayaan (warisan tak benda) yang ditetapkan dan dilindungi

Apabila melihat kepada isu-isu penting yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan didapat hubungan antara isu-isu tersebut dengan program dan kegiatan yang telah disusun.

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempersiapkan program dan kegiatan yang merupakan upaya untuk lebih meningkatkan pembangunan dalam bidang pariwisata dan budaya.

Untuk mendapatkan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dilakukan berbagai tahapan perencanaan dan membuka saluran informasi dengan berbagai komponen masyarakat. Usulan-usulan yang berkembang di dalam berbagai tahapan perencanaan itu kemudian dianalisis dan dilakukan penelaahan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai usulan program dan kegiatan untuk tahun 2023.

2.3.2. Uraian tentang permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Hampir disemua daerah permasalahan itu ada dan selalu timbul didalam melakukan pekerjaan, tidak terkecuali pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor yang dalam melaksanakan program pengembangan pariwisata dan budaya, misalnya banyak terdapat objek dan daya tarik wisata yang bukan menjadi kewenangan Kabupaten Bogor sehingga sulit untuk dikembangkan. Maraknya pungutan liar pada suatu objek wisata yang bukan menjadi kewenangan Disbudpar Kabupaten Bogor menambah buruk citra pariwisata Kabupaten Bogor. Luas wilayah menyebabkan jarak yang jauh serta minimnya fasilitas, transportasi yang belum siap menjadi penghambat wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bogor.

2.3.3. Dampak pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDG's (Sustainable Development Goals)

Visi Kabupaten Bogor adalah “**MEWUJUDKAN KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN**”.

Makna dari visi Bupati Terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

TERMAJU, memiliki makna bahwa perolehan pembangunan Kabupaten Bogor memiliki laju yang massif, bisa menandingi laju pencapaian pembangunan di tingkat Jawa Barat maupun Nasional

sehingga tentunya ini sangat berpengaruh terhadap Target SPM karena masuk didalam program baik untuk PD maupun BUMD serta Stake Holder Pariwisata, begitupun terhadap SDG's karena ini berhubungan dengan indikator SDG's berupa kunjungan wisata dan SDM bidang pariwisata, sehingga mendukung pada kebijakan nasional.

NYAMAN, memiliki makna bahwa Kabupaten Bogor dapat menjadi Kabupaten yang nyaman untuk beraktifitas, nyaman sebagai hunian dan ramah untuk berinvestasi, hal ini pun tentunya berdampak pada pelayanan dalam menciptakan kenyamanan bagi para pengunjung sehingga berdampak pada kunjungan wisatawan.

BERKEADABAN, memiliki makna bahwa masyarakat Kabupaten Bogor senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya. Menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah, toleran dan berakhlakul karimah, hal ini sebetulnya tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap program SPM, NSPK dan SDG'S tetapi program ini tetap harus dijalankan untuk mempertahankan norma, etika, adat istiadat dalam upaya pelestarian budaya.

Misi Bupati Bogor untuk bidang pariwisata adalah **Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan** sedangkan arah kebijakannya adalah mengembangkan pariwisata yang edukatif dan kreatif berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan, ini pun masih berkaitan erat dengan program pengembangan pariwisata nasional dan provinsi, sebagaimana tertuang dalam NAWA CITA. Sebagai industri jasa, sektor Pariwisata telah memberikan kontribusi dan peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, pengembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kontribusi dalam menyumbangkan devisa, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, di samping peran sosial, budaya, dan lingkungan dalam kerangka pelestarian sumber daya alam dan budaya, maupun dalam meningkatkan rasa cinta tanah air dan perekat persatuan bangsa. Berdasarkan amanat Presiden Republik Indonesia, Pariwisata Indonesia diharapkan dapat terus diperkuat dan dikembangkan menjadi sektor strategis dan pilar pembangunan perekonomian nasional, serta

akan dapat mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta dan pergerakan wisatawan nusantara sebesar 275 juta perjalanan pada tahun 2019 mendatang.

Misi Bupati untuk bidang Budaya adalah **Mewujudkan kesalehan sosial**, sedangkan arah kebijakannya adalah **melestarikan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal artinya sejalan dengan tujuan nasional**, memeriksa permasalahan yang merintangai usaha pemajuan kebudayaan di berbagai daerah dan sektor, serta mempertimbangkan kedudukan strategi kebudayaan dalam siklus perencanaan kebudayaan nasional, maka ditetapkanlah visi pemajuan kebudayaan 20 tahun ke depan, yaitu “Indonesia Bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya”.

2.3.4. Uraian tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Wilayah Kabupaten Bogor yang sangat luas menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkannya begitupun jarak yang jauh dan akses jalan yang rusak untuk mencapai suatu objek wisata memerlukan sedikit perjuangan dalam mengembangkannya. Sedangkan untuk peluang dalam bidang pariwisata dan budaya sangat banyak melihat potensi alam dan dengan ragam keindahan seolah menjadi daya tarik tersendiri bagi Kabupaten Bogor, begitupun dengan budayanya dikarenakan Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan yang kadang-kadang berbeda pula seni dan budaya serta keunggulan masing-masing tempat.

2.3.5. Uraian tentang formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Berdasarkan hasil review isu-isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi: analisa RPJMN, renstra Kementerian Pertanian

Republik Indonesia, RPJMD Provinsi Jawa Barat, analisa renstra Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat, RPJMD Kabupaten Bogor, analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dalam tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata
2. Pengembangan Promosi dan fasilitasi pemasaran, pemanfaatan sistem informasi dan menjalin kerjasama dan kemitraan
3. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif
5. Pengelolaan kebudayaan dan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah
6. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah
7. Pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya sebagai kekayaan budaya

2.3.6. Perubahan – Perubahan yang Terjadi Akibat Pandemi COVID – 19 Hingga Akhir Tahun 2021

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan lokomotif dari kedinasan yang menjadi salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Banyak sekali dampak yang di timbulkan dari akibat wabah Virus Corona (COVID-19) bagi industri pariwisata di Kabupaten Bogor. Untuk mencegah terjadinya penularan secara massal, maka di batasnya mobilitas masyarakat akibat pandemi COVID-19, serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi dan hiburan memberi dampak ekonomi cukup besar terhadap sektor pariwisata. Sehingga, terjadi pembatasan pengunjung domestik dan juga terjadi pembatalan kedatangan wisatawan Mancanegara.

Secara umum permasalahan dasar tidak tercapainya kedua indikator pelayanan dari sektor Pariwisata tersebut adalah karena pada Tahun 2020 terjadi Wabah Pandemi Covid-19, usaha atau industri sektor

pariwisata tidak dapat berjalan sebagaimana dengan semestinya, karena pada hakikatnya Pariwisata adalah bentuk perjalanan seseorang atau kelompok dari suatu tempat ke tempat lain, saat terjadi Pandemi Covid-19 kegiatan perjalanan tersebut tidak bisa terjadi karena adanya kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat demi meminimalisir penyebaran wabah tersebut. Selama kondisi tersebut maka bentuk-bentuk kegiatan pariwisata sangat terbatas hingga mungkin hampir tidak berjalan pada unit atau sektor tertentu.

Secara khusus, selain dampak Pandemi Covid-19, permasalahan yang ada saat ini adalah tipe dan jenis pengunjung atau wisatawan yang tertarik untuk datang ke kabupaten bogor masih di dominasi oleh pengunjung lokal dan jenis pengunjung one day trip walaupun sebetulnya banyak wisatawan yang menginap di kabupaten bogor melebihi dari 2 hari satu malam seperti wisatawan timur tengah dan juga wisatawan dalam negeri yang memang jaraknya jauh dari kabupaten bogor, namun sayangnya apabila kita jumlahkan rata-rata lama tinggal maka hal tersebut akan mempengaruhi kepada lamanya kunjungan dimana dominasi lokal masih mengalahkan wisatawan luar.

Diharapkan pada tahun 2023 wabah pandemi Covid-19 sudah 100% tuntas, sehingga tidak ada lagi pembatasan-pembatasan yang menghambat pola pergerakan wisatawan, serta dengan hilangnya wabah tersebut pertumbuhan ekonomi di Indonesia bergerak ke arah lebih baik sehingga daya beli masyarakat untuk berwisata menjadi meningkat. Dengan demikian IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang tidak bisa tercapai di tahun 2021 akibat wabah tersebut dapat tercapai di tahun 2023.

Bab III

Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Uraian terkait arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Kebijakan Nasional Pengembangan 10 Kawasan Pariwisata, 4 KEK Pariwisata, dan Penguatan Destinasi Unggulan sehingga Prioritas Pembangunan Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya yang kemudian disesuaikan dengan Visi Bupati Bogor Terwujudnya Kabupaten Termaju, Nyaman dan Berkeadaban kemudian menjadi Misi:

1. ***Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan*** dengan Sasaran Programnya adalah:
 - a. Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - b. Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata
 - c. Pengembangan Kemitraan
2. ***Mewujudkan kesalehan sosial*** dengan Sasaran Programnya adalah:
 - a. Pengembangan Nilai Budaya
 - b. Pengelolaan Keragaman Budaya
 - c. Pengelolaan Kekayaan Budaya

Tabel 3.1
Prioritas Pembangunan Nasional

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		ANGGARAN
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	
1	2	3	4	5	6		7
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10	%	2.430.790.385
			Bertambahnya Tingkat hunian akomodasi	Tingkat hunian akomodasi	70	%	
		Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor	25,00	%	1.819.681.076
			Meningkatnya perjalanan wisatawan Nusantara	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Bogor	25,00	%	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan	17	Sub Sektor	397.883.668
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Daya Saing SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif Melalui Sertifikasi Nasional	Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi	120	Orang	796.667.831
2	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan Upaya pelestarian Festival Seni dan Budaya	Kegiatan Seni Budaya yang Diselenggarakan	10	Festival/ Upacara Adat	459.836.572
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pengembangan upaya pelestarian kesenian tradisional	Kesenian tradisional yang dilestarikan	48	Kesenian	482.891.518
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan	50,00	%	707.861.290

Tabel 3.2
Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		ANGGARAN
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	
1	2	3	4	5	6		7
1	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan	17	Sub Sektor	397.883.668
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Daya Saing SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif Melalui Sertifikasi Nasional	Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi	120	Orang	796.667.831
2	Reformasi sistem Pendidikan dan pemajuan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan Upaya pelestarian Festival Seni dan Budaya	Kegiatan Seni Budaya yang Diselenggarakan	10	Festival/ Upacara Adat	459.836.572
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pengembangan upaya pelestarian kesenian tradisional	Kesenian tradisional yang dilestarikan	48	Kesenian	482.891.518
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan	50,00	%	707.861.290
3	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10	%	2.430.790.385
			Bertambahnya Tingkat hunian akomodasi	Tingkat hunian akomodasi	70	%	
		Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor	25,00	%	1.819.681.076
			Meningkatnya perjalanan wisatawan Nusantara	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Bogor	25,00	%	

3.1.2. Uraian terkait arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Kebijakan Provinsi Jawa Barat (a) Pariwisata Juara – membangun akses ke destinasi yang sudah ada; membangun destinasi wisata baru dan membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis pariwisata, (b) Ekonomi Kreatif Juara – Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha, sarana prasarana, dan pengembangan produk ekonomi kreatif, serta pemanfaatan teknologi digital dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat adalah Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata yang apabila dikaitkan dengan Visi Misi Bupati Bogor maka masuk dalam Misi Bupati *Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan* dengan Sasaran Programnya sesuai dengan sasaran program Disbudpar yaitu:

- a. Pengembangan Destinasi pariwisata
- b. Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata
- c. Pengembangan Kemitraan
- d. Pengembangan Nilai Budaya
- e. Pengelolaan Keragaman budaya
- f. Pengelolaan Kekayaan Budaya

Tabel 3.3
Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	BIDANG/SEKSI/SUBID/UPT PENGAMPU
1	2	3
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Bidang Pemasaran Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Bidang Kebudayaan, Seksi Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Bidang Kebudayaan, Seksi Kesenian
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Bidang Kebudayaan, Seksi Cagar Budaya dan Sejarah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kesekretariatan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dirancang untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pembangunan pariwisata dan budaya di Kabupaten Bogor. Inventarisasi program dan kegiatan dilakukan secara seksama guna memaksimalkan hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan pariwisata dan budaya.

Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang pertama adalah **Pelestarian Kebudayaan** dengan Indikator tujuan adalah Persentase Kebudayaan yang dilestarikan. Dari tujuan perangkat Daerah tersebut dijabarkan dalam 2 sasaran perangkat Daerah yaitu: Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Sedangkan outcome yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya Upaya pelestarian kebudayaan melalui penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya;
2. Berkembangnya upaya pelestarian kesenian tradisional;
3. Terlestarikannya Cagar Budaya.

Lalu Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang kedua adalah **Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah**. Dengan Sasaran yang menunjangnya adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Sedangkan Outcome yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD;
2. Bertambahnya Tingkat hunian akomodasi;
3. Meningkatnya pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor;
4. Meningkatnya perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Bogor;
5. Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif ;
6. Meningkatnya Daya Saing SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif Melalui Sertifikasi Nasional.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2023 diimplementasikan ke

dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dirancang agar dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023

URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
	1	2	3	4	
TUJUAN					
Meningkatnya daya saing pariwisata daerah	Meningkatnya Taraf Pariwisata Kabupaten Bogor	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	PDRB Sektor Pariwisata / PDRB Kabupaten Bogor x 100%	5,08	%
Pelestarian Kebudayaan	Terlestarikannya Seni Dan Budaya	Persentase Kebudayaan yang dilestarikan	Jumlah Kebudayaan yang dilestarikan (Festival Budaya + BCB + Karya budaya) / Jumlah Keseluruhan Kebudayaan x 100%	58,88	%
SASARAN					
Meningkatnya Kunjungan Wisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara + Wisatawan Mancanegara	10.000.000	Kunjungan
Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlestarikannya Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bogor	Objek Kemajuan Budaya yang dilestarikan	Jumlah festival Budaya + karya budaya	58	Objek Budaya
Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Terlestarikannya Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah BCB yang dilestarikan	72	Cagar Budaya

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung strategi dan arah kebijakan daerah sesuai RPJMD Kabupaten Bogor 2018 – 2023 lalu dituangkan dalam Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan, pada Renja 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor memiliki rencana program di bidang pariwisata dan budaya yang memiliki indikator pendukung yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah, sebagai berikut:

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, yaitu program yang memiliki fungsi melaksanakan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata kabupaten, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten, menyusun kebijakan teknis terkait penertiban TDU pariwisata kabupaten (sebagai bahan acuan TPSP untuk menatausahakan pelayanan TDU pariwisata), pembinaan Pelaku Usaha Kepariwisataaan, melaksanakan penerapan standar usaha kepariwisataaan, penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku; usaha kepariwisataaan.

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata memiliki indikator dan capaian program pada tahun 2023 yaitu Kontribusi sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan besaran 10% kemudian indikator lainnya adalah persentase tingkat hunian akomodasi sebesar 70% pada tahun 2023.

Program Pemasaran Pariwisata, yaitu program yang memiliki fungsi melakukan promosi pariwisata dalam dan luar negeri, menyelenggarakan penyediaan bahan promosi kepariwisataaan, pengelolaan data dan sistem informasi kepariwisataaan, menyelenggarakan kajian dan penelitian tentang pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dinas, menyelenggarakan event pariwisata kabupaten dan melakukan pengelolaan pelaksanaan event di kabupaten.

Program Pemasaran Pariwisata memiliki indikator dan capaian program yaitu Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Meningkatnya perjalanan wisatawan Nusantara dengan indikator Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor dan Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota Bogor yang sama-sama sebanyak 25%.

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu program yang

memiliki fungsi melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif (Ekraf) dengan pemanfaatan dan Perlindungan melalui fasilitasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi produk-produk ekraf.

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2023 memiliki indikator program yaitu Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan 17 sub sektor.

Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu program yang memiliki fungsi mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, melaksanakan penerapan sertifikasi profesi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menjalin kemitraan, menyelenggarakan kerjasama kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif, melakukan hubungan dengan lembaga dan pihak lain, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan publikasi, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan kehumasan.

Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki indikator dan capaian program pada tahun 2023 yaitu Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi dengan besaran target 120 orang.

Program Pengembangan Kebudayaan, yaitu program yang memiliki fungsi pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten, pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten, pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten.

Program Pengembangan Kebudayaan memiliki indikator pada tahun 2023 yaitu Kegiatan seni budaya yang diselenggarakan dengan target capaian program 10 Festival / Upacara.

Program Pengembangan Kesenian Tradisional, yaitu program yang memiliki fungsi Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten dan juga pembinaan terhadap sanggar seni yang ada di Kabupaten Bogor.

Program Pengembangan Kesenian Tradisional memiliki indikator Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan dengan capaian program tahun 2023 sebanyak 48 kesenian.

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, yaitu program yang memiliki fungsi pembinaan sejarah lokal kabupaten, penetapan cagar budaya peringkat kabupaten, pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten, penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan pengelolaan museum kabupaten.

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya memiliki indikator Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 50%.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yaitu program yang memiliki fungsi melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas, penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan dinas, dan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan dinas.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki indikator dan capain pada tahun 2023 yaitu terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan indikator capaian Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebesar 100%

Tabel 3.5
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

BIDANG / BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Bidang Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	3	10	2.430.790.385
Bidang Kebudayaan	3	4	6	1.650.589.380
Bidang Pemasaran Pariwisata	1	1	4	1.819.681.076
Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2	3	6	1.194.551.499
Kesekretariatan	1	7	28	12.692.890.948

3.4. Dukungan Terhadap Pencapaian Pancakarsa

Dukungan terhadap Pencapaian Pancakarsa sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.6
Target Pancakarsa Tahun 2023**

Indikator Pancakarsa	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub-Sub Kegiatan	Target		
					Volume	Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	
MAJU							
Penyelenggaraan event pariwisata tingkat nasional dan internasional	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan event dan supporting event	4	Kegiatan	500.509.000
Festival wisata desa	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Festival Wisata Desa	1	Kegiatan	197.380.000
Pengembangan Geopark	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Geopark Information Center	1	Lokasi	-
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Penyusunan DED daya Tarik Wisata Goa Gudawang, dalam kawasan Geopark	1	Dokumen	150.000.000
BERKEADABAN							

Indikator Pancakarsa	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub-Sub Kegiatan	Target		
					Volume	Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	
Menyelenggarakan festival seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Festival/ Upacara Adat	10	Kegiatan Budaya	138.584.400
Pengembangan dan pelestarian budaya Cimande	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pasanggiri Seni Cimande	1	Kegiatan	321.252.172
Pelestarian budaya melalui program Bogor Culture Night	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pelaksanaan Bogor Culture Night	15	Penampilan	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2023 mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018-2023 dan RKPD tahun 2023 bersumber dari APBD seluruhnya sebesar Rp. 19.788.503.288,- dengan jumlah seluruhnya 8 Program, 18 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan dengan rincian masing masing bidang adalah seperti berikut:

1. Sekretariat, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bersumber dari APBD dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 12.692.890.948;
2. Bidang Kebudayaan, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional dan Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, bersumber dari APBD dengan total jumlah kegiatan sebanyak 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.650.589.380;
3. Bidang Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata bersumber dari APBD dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.430.790.385;
4. Bidang Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata bersumber dari APBD dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.819.681.076;
5. Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersumber dari APBD dengan total jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.194.551.499;

Untuk Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018-2023 dan RKPD tahun 2023 yang bersumber dari APBD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					14.343.480.328	Kabupaten Bogor	APBD		18.242.444.823
Program Pengembangan Kebudayaan		Kegiatan Seni Budaya yang Diselenggarakan	Festival/ Upacara Adat	10	459.836.572	Kabupaten Bogor	APBD	11	508.353.964
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya	Upacara Adat	10	138.584.400	Kabupaten Bogor	APBD	11	143.059.020
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	10	138.584.400	Kabupaten Bogor	APBD	11	143.059.020
Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya penampilan kesenian	Penampilan seni	12	321.252.172	Kabupaten Bogor	APBD	13	365.294.945

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	15	321.252.172	Kabupaten Bogor	APBD	17	365.294.945
Program Pengembangan Kesenian Tradisional		Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	Kesenian	48	482.891.518	Kabupaten Bogor	APBD	53	433.187.775
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terbinanya Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Orang	75	482.891.518	Kabupaten Bogor	APBD	53	433.187.775
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	75	202.975.618	Kabupaten Bogor	APBD	53	173.774.775
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	14	279.915.900	Kabupaten Bogor	APBD	16	413.413.000
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan	%	50	707.861.290	Kabupaten Bogor	APBD	55	1.238.338.416
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah Cagar Budaya yang Terlestarikan	Cagar Budaya	72	707.861.290	Kabupaten Bogor	APBD	78	1.238.338.416
	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	6	304.999.030	Kabupaten Bogor	APBD	7	550.989.819

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	67	402.862.260	Kabupaten Bogor	APBD	71	443.148.597
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	12.692.890.948	Kabupaten Bogor	APBD	110	16.062.564.667
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dokumen	27	341.345.604	Kabupaten Bogor	APBD	27	340.630.941
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	171.006.536	Kabupaten Bogor	APBD	4	159.037.775
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	22.774.500	Kabupaten Bogor	APBD	2	16.765.654
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	10.584.500	Kabupaten Bogor	APBD	2	14.469.516
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	2	9.192.800	Kabupaten Bogor	APBD	2	16.045.981

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kinerja SKPD							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	17	127.787.268	Kabupaten Bogor	APBD	17	134.312.015
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	10.048.290.587	Kabupaten Bogor	APBD	12	12.440.820.273
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	64	9.886.175.951	Kabupaten Bogor	APBD	64	12.264.135.178
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	134.868.386	Kabupaten Bogor	APBD	12	146.708.009
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	17	12.177.600	Kabupaten Bogor	APBD	17	13.395.495

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	7.738.875	Kabupaten Bogor	APBD	12	8.514.971
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	7.329.775	Kabupaten Bogor	APBD	2	8.066.619
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					256.121.340	Kabupaten Bogor	APBD		537.417.769
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	226.121.340	Kabupaten Bogor	APBD	12	295.417.769
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	64	30.000.000	Kabupaten Bogor	APBD	64	242.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					395.374.525	Kabupaten Bogor	APBD		277.578.237
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.016.250	Kabupaten Bogor	APBD	1	1.715.414

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	117.525.425	Kabupaten Bogor	APBD	1	17.891.766
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	5.641.500	Kabupaten Bogor	APBD	1	2.570.262
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	18.715.000	Kabupaten Bogor	APBD	1	18.444.473
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	-	Kabupaten Bogor	APBD	12	10.934.734
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	-	Kabupaten Bogor	APBD	12	82.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	238.865.000	Kabupaten Bogor	APBD	12	110.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	10.611.350	Kabupaten Bogor	APBD	12	33.521.588
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	Kabupaten Bogor	APBD		806.119.600
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	12	-	Kabupaten Bogor	APBD	12	-

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	10	-	Kabupaten Bogor	APBD	10	110.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					743.312.556	Kabupaten Bogor	APBD		757.028.580
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	240.002.928	Kabupaten Bogor	APBD	12	196.028.580
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	503.309.628	Kabupaten Bogor	APBD	12	561.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					908.446.336	Kabupaten Bogor	APBD		902.969.267
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	225.300.000	Kabupaten Bogor	APBD	5	59.805.159
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	26.800.000	Kabupaten Bogor	APBD	20	220.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	656.346.336	Kabupaten Bogor	APBD	1	623.164.108
						Kabupaten Bogor	APBD	0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					5.445.022.960	Kabupaten Bogor	APBD	0	8.832.581.847
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	10	2.430.790.385	Kabupaten Bogor	APBD	10	4.960.311.697
		Tingkat Hunian Akomodasi	%	60		Kabupaten Bogor	APBD	60	-
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Tersusunnya perencanaan kawasan strategis	DTW	131	1.374.778.310	Kabupaten Bogor	APBD	135	1.408.857.715
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	2	504.685.270	Kabupaten Bogor	APBD	2	1.126.222.925
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	131	247.786.540	Kabupaten Bogor	APBD	135	110.931.170
	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata	Dokumen	2	622.306.500	Kabupaten Bogor	APBD	2	275.103.620

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kabupaten/Kota							
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Tersusunnya perencanaan kawasan strategis	Kawasan	1	104.826.407	Kabupaten Bogor	APBD	1	767.089.235
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	Kabupaten Bogor	APBD	1	550.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	234	104.826.407	Kabupaten Bogor	APBD	234	115.312.285
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Desa Wisata yang dikelola	Desa Wisata	50	951.185.668	Kabupaten Bogor	APBD	55	2.784.364.747
	Perencanaan Destinasi Pariwisata	Terlaksananya Perencanaan Kawasan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	Kabupaten Bogor	APBD	1	1.100.000.000
	Pengadaan dan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	50	-	Kabupaten Bogor	APBD	55	-

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	132	98.119.668	Kabupaten Bogor	APBD	145	110.703.855
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	1	853.066.000	Kabupaten Bogor	APBD	1	1.130.671.800
Program Pemasaran Pariwisata		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor	%	25,00	1.819.681.076	Kabupaten Bogor	APBD	27,5	2.508.341.466
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Bogor	%	25,00		Kabupaten Bogor	APBD	27,5	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Terselenggaranya kegiatan pemasaran Pariwisata Kabupaten Bogor	Kegiatan Pemasaran	4	1.819.681.076	Kabupaten Bogor	APBD	4	2.508.341.466
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	322.779.700	Kabupaten Bogor	APBD	4	355.058.598

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	11	750.509.000	Kabupaten Bogor	APBD	12	1.100.561.023
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	5	612.167.676	Kabupaten Bogor	APBD	5	563.389.523
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	6	134.224.700	Kabupaten Bogor	APBD	6	250.632.322
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan	Sub Sektor	17	397.883.668	Kabupaten Bogor	APBD	17	437.672.035
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Produk Usaha Ekonomi Kreatif Yang Difasilitasi	Produk Usaha	60	397.883.668	Kabupaten Bogor	APBD	66	437.672.035

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	60	119.821.946	Kabupaten Bogor	APBD	66	131.804.141
	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	231.378.584	Kabupaten Bogor	APBD	1	254.516.442
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	60	46.683.138	Kabupaten Bogor	APBD	66	51.351.451
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi	Orang	120	796.667.831	Kabupaten Bogor	APBD	132	926.256.649
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	120	420.398.893	Kabupaten Bogor	APBD	132	512.360.770

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	56	32.024.268	Kabupaten Bogor	APBD	62	35.226.695
	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	50	388.374.625	Kabupaten Bogor	APBD	55	477.134.075
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dilatih	Orang	150	376.268.938	Kabupaten Bogor	APBD	165	413.895.879
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	150	376.268.938	Kabupaten Bogor	APBD	165	413.895.879

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan perangkat daerah yang wajib disusun setiap tahun, sekaligus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RKPD tahun 2023, dan termuat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan pedoman dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Selanjutnya, dalam rangka merinci pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan rencana anggaran, dokumen Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023.

Plt. BUPATI BOGOR

IWAN SETIAWAN